

Evaluasi Efektivitas Program Keluarga Berencana di Perkotaan: Studi Kasus Kota Makassar

Mutmainnah¹, Irwansyah Sukri², Nurul Ilmi Rasjusti³, Fadil Muhammad⁴

^{1,2,4} Jurusan Geografi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Bisnis Digital, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Corresponding Author: Mutmainnah, e-mail: mutmainnah.geo@unm.ac.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di kawasan urban seperti Kota Makassar menimbulkan tantangan serius terhadap kapasitas layanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan dan masyarakat, serta analisis dokumen kebijakan dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di Kota Makassar berhasil menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) hingga di bawah target nasional, serta mengurangi laju pertumbuhan penduduk secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Efektivitas ini didukung oleh strategi komunikasi yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal dan perluasan akses layanan kontrasepsi melalui penyuluhan dan program “Kampung KB”. Namun demikian, tantangan masih ada dalam bentuk keterbatasan akses di wilayah tertentu, kesenjangan informasi, dan resistensi budaya terhadap penggunaan kontrasepsi. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas dalam kebijakan kependudukan. Implikasinya, kebijakan KB yang dirancang secara kontekstual mampu meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan strategi pengendalian penduduk di kawasan urban Indonesia.

Kata kunci: Keluarga Berencana, Pertumbuhan Penduduk, Kota Makassar, Kebijakan Kependudukan, Kontrasepsi

ABSTRACT

Uncontrolled population growth in urban areas such as Makassar City poses significant challenges to public service capacity and sustainable development. This study aims to analyze the effectiveness of the Family Planning (FP) program implemented by the Office of Population Control and Family Planning in Makassar in reducing the city's population growth rate. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing data collected through field observation, in-depth interviews with policy actors and community members, as well as analysis of policy documents and demographic statistics. The findings reveal that the implementation of the FP program in Makassar has successfully reduced the Total Fertility Rate (TFR) to below the national target and achieved a consistent decline in population growth over the past five years. This effectiveness is attributed to culturally contextualized communication strategies and expanded access to contraceptive services through community outreach and the “Family Planning Villages” initiative. Nevertheless, challenges persist, particularly in terms of service access disparities, misinformation, and cultural resistance to contraceptive use. These results underscore the importance of integrating educational, participatory, and community-based approaches into population policy. The implication is that context-sensitive FP strategies can enhance quality of life and support long-term sustainable development. This study contributes empirical evidence to the growing body of knowledge on urban population control strategies in Indonesia.

Keywords: Family Planning, Population Growth, Makassar City, Population Policy, Contraception

The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis dalam merancang dan melaksanakan program publik yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Kedekatan dengan komunitas memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan nasional secara kontekstual, sehingga relevansi dan efektivitas program menjadi lebih optimal di tingkat akar rumput. Salah satu bidang yang sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan lokal adalah program keluarga berencana (KB). Program ini sangat mengandalkan keberadaan dan kualitas pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas dan Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam hal dukungan kebijakan, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategis (Yukl & Becker, 2006). Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, peran dan tanggung jawab pemerintah lokal dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan menjadi semakin sentral. Dengan berlakunya desentralisasi, tanggung jawab pelaksanaan kebijakan keluarga berencana secara substansial berpindah ke pemerintah daerah. Mereka kini memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi demografis lokal. Oleh karena itu, keberhasilan program keluarga berencana sangat ditentukan oleh kapasitas dan performa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kebijakan ini (Rompah, 2023). Kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan urbanisasi yang pesat, menjadi contoh konkret bagaimana tantangan kepadatan penduduk dan pembangunan perkotaan menuntut strategi pengendalian penduduk yang komprehensif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.474.393 jiwa dengan luas wilayah sekitar 175,77 km². Angka ini mencerminkan kepadatan penduduk sebesar 8.388 jiwa per km², yang menimbulkan berbagai persoalan terkait infrastruktur, layanan publik, keterbatasan sumber daya, serta tekanan terhadap lingkungan hidup (BPS, 2024).

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali memiliki implikasi luas terhadap keberlanjutan pembangunan. Ketika pertumbuhan penduduk melampaui kapasitas penyediaan layanan dasar—seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja—maka kualitas hidup masyarakat cenderung menurun. Dalam konteks ini, pengendalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Intervensi seperti edukasi kesehatan reproduksi, penyediaan alat kontrasepsi yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaturan kelahiran merupakan upaya mendasar dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, keberhasilan program KB harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar pertumbuhan penduduk yang ada dapat menjadi aset bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bekerja sama dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong pelaksanaan program KB secara sistematis. DPPKB bertugas mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan serta menciptakan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi dari masyarakat yang produktif dan sejahtera. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia subur (WUS) yang tidak terjangkau oleh program ini. Banyak di antaranya yang belum menggunakan alat kontrasepsi, meskipun memiliki keinginan untuk menunda atau menghentikan kehamilan. Kondisi ini mencerminkan tingginya angka *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Masalah *unmet need* ini, terutama pada kelompok yang secara sadar ingin menunda atau menghentikan kelahiran namun tidak menggunakan alat kontrasepsi, menunjukkan adanya hambatan baik dari sisi akses layanan maupun faktor sosial-budaya. PUS yang termasuk dalam kategori ini memiliki risiko tinggi mengalami kehamilan tidak diinginkan, yang tidak jarang berujung pada tindakan aborsi tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan ibu. Situasi ini mengindikasikan adanya kekurangan mendasar dalam efektivitas pelayanan program KB. Meskipun DPPKB telah melaksanakan berbagai program seperti pembagian alat kontrasepsi, layanan pemasangan, penyuluhan hingga tingkat kelurahan, dan monitoring lapangan, data empiris menunjukkan bahwa dampaknya terhadap penurunan angka kelahiran belum optimal.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, DPPKB Kota Makassar mengembangkan beberapa strategi intervensi. Strategi ini mencakup distribusi rutin alat kontrasepsi, penyuluhan langsung kepada masyarakat, pembentukan “Kampung KB” sebagai pusat edukasi keluarga berencana, dan penyediaan layanan mobile yang menjangkau wilayah sulit akses. Kendati demikian, program-program ini perlu dievaluasi secara objektif: apakah benar-benar berhasil mengubah perilaku reproduksi masyarakat, meningkatkan prevalensi kontrasepsi, dan menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR). Lebih jauh, efektivitas program tidak hanya bergantung pada aspek teknis pelaksanaan, melainkan juga pada penerimaan dan kesesuaian sosial dengan nilai-nilai masyarakat sasaran, terutama di wilayah yang masih mempertahankan tradisi atau norma-norma konservatif.

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan pentingnya keselarasan antara strategi program KB dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal agar dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Yukl dan Becker (2006) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kepemimpinan dan pemberdayaan lokal yang efektif. Rompah (2023), dalam studinya di Kota Bitung, menegaskan bahwa efektivitas program KB sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik masyarakat. Begitu pula Budiani (2007) dan

Andhika (2022) menyoroti pentingnya komunikasi interpersonal yang persuasif serta keterlibatan komunitas dalam peningkatan efektivitas program. Secara umum, literatur menegaskan bahwa pelaksanaan program KB yang bersifat sentralistik akan sulit berhasil tanpa adanya adaptasi lokal, partisipasi masyarakat, dan strategi komunikasi yang responsif.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program keluarga berencana yang dijalankan oleh DPPKB Kota Makassar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program, serta mengkaji apakah strategi yang telah diterapkan telah memberikan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif, terutama bagi perbaikan implementasi program KB di daerah-daerah perkotaan yang memiliki karakteristik serupa.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif berbasis data lokal di tingkat kota, yang masih jarang dijadikan fokus kajian dalam literatur nasional. Sementara sebagian besar studi terdahulu berfokus pada evaluasi tingkat nasional atau provinsi, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dari tingkat kota dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan informan dari berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat pengguna layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara komprehensif dalam konteks yang alami, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan kependudukan di tingkat lokal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana program KB dijalankan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan instansi pelaksana utama program KB di wilayah tersebut. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan pusat administrasi dan pengambilan kebijakan program kependudukan di tingkat kota. Penelitian dilakukan selama bulan Januari 2025, mencakup tahap observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Peneliti mendekati permasalahan secara induktif, sehingga pengumpulan data dilakukan secara fleksibel dan dinamis menyesuaikan perkembangan temuan lapangan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan program KB. Informan terdiri atas berbagai aktor strategis, termasuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, petugas lapangan dan penyuluh KB, serta masyarakat yang menjadi pengguna layanan KB, khususnya pasangan usia subur (PUS). Selain itu, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar turut dilibatkan untuk memberikan perspektif statistik dan makro demografis. Jumlah informan tidak ditentukan secara tetap, melainkan mengikuti prinsip saturasi data, yakni proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru yang signifikan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk mengamati secara langsung aktivitas pelayanan KB, interaksi antara petugas dan pengguna layanan, serta sarana prasarana yang tersedia di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan semi-terstruktur. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, persepsi, serta pengalaman para informan mengenai efektivitas program KB. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam dengan persetujuan informan, dan kemudian ditranskripsikan untuk kepentingan analisis data. Sementara itu, dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen kebijakan, laporan kegiatan, statistik kependudukan dari BPS, serta materi-materi sosialisasi program KB yang digunakan oleh DPPKB Kota Makassar.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah diringkas disusun dan disajikan dalam bentuk naratif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Proses analisis ini berlangsung secara siklus dan paralel dengan pengumpulan data, sehingga memungkinkan revisi dan penguatan fokus kajian secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria validitas data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dicapai melalui triangulasi data, baik dari segi sumber, teknik, maupun waktu, serta melalui proses pengecekan ulang hasil wawancara kepada informan terkait. Transferabilitas dijaga dengan menyajikan deskripsi konteks secara mendalam agar pembaca dapat menilai keterpindahan hasil ke konteks lain yang serupa. Dependabilitas dicapai dengan melacak seluruh proses penelitian secara

sistematis dan transparan, termasuk dokumentasi prosedur dan logika analisis. Adapun konfirmabilitas ditunjukkan melalui objektivitas data dan hasil analisis yang tidak didasarkan pada persepsi subjektif peneliti semata, melainkan dapat diverifikasi oleh pihak lain.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas program KB di Kota Makassar serta menyumbangkan temuan empiris yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan kependudukan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Berencana

Sasaran program Keluarga Berencana (KB) merupakan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Kota Makassar, sasaran program KB diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, sasaran langsung mencakup Pasangan Usia Subur (PUS), yaitu individu atau pasangan dalam rentang usia reproduktif yang menjadi subjek utama dalam intervensi program KB. Kedua, sasaran tidak langsung mencakup upaya pelaksanaan program KB secara sistematis dalam rangka menurunkan angka fertilitas (Total Fertility Rate/'TFR). Pendekatan ini dilakukan melalui integrasi dengan kebijakan kependudukan yang komprehensif, mencakup edukasi, pelayanan kontrasepsi, serta penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi sebagai strategi jangka panjang untuk mencapai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan selama periode 2014 hingga 2024.

Tabel 1. Pertumbuhan penduduk Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Penduduk (%)
1	2015	1,58
2	2016	1,51
3	2017	1,49
4	2018	1,46
5	2019	1,44
6	2020	0,60
7	2021	0,99
8	2022	0,84
9	2023	0,79
10	2024	0,76

Sumber : BPS

Tabel 1 Menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai 2020, kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan, namun perlahan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 ke angka 0,76%. Tren angka kelahiran di Kota Makassar adanya penurunan didukung oleh data yang tersedia bahwa Angka *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Makassar pada tahun 2023 adalah 2,14, berdasarkan data pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022. Target TFR tahun 2023 sebesar 2,19 sudah tercapai, karena angka TFR yang tercatat lebih rendah. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 juga menunjukkan TFR sebesar 2,18 secara signifikan angka TFR terus menurun, hanya saja untuk mencapai target TRF nasional, masih membutuhkan strategi-strategi khusus di lapangan.

Sasaran Keluarga Berencana (KB) secara umum dibagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah pasangan usia subur (PUS) yang ingin mencegah kehamilan, mengatur jarak dan membatasi kelahiran. Sasaran tidak langsung adalah masyarakat umum yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung KB, petugas kesehatan dan kader KB, remaja dan calon pasangan usia subur (edukasi pra-nikah), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menurunkan tingkat fertilitas melalui penerapan kebijakan kependudukan yang bersifat terpadu, sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Efektivitas Program KB dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar mengalami penurunan bertahap dari 1,58% pada tahun 2015 menjadi 0,76% pada tahun 2024. Penurunan ini juga sejalan dengan angka *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Makassar yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,14, lebih rendah dari target nasional sebesar 2,19. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah kota dalam bentuk distribusi kontrasepsi, penyuluhan, dan penyediaan akses terhadap layanan KB telah memberikan dampak nyata terhadap perilaku reproduksi masyarakat. Dinamika penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut juga menunjukkan bahwa program

KB di Kota Makassar tidak hanya bersifat administratif atau formalitas belaka, melainkan telah menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan kota. Namun, efektivitas ini belum dapat dikatakan optimal secara menyeluruh, mengingat masih terdapat wilayah dan kelompok masyarakat dengan angka unmet need yang tinggi, khususnya di daerah pinggiran kota dan kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, efektivitas program KB di Kota Makassar bersifat relatif, yakni efektif dalam

konteks populasi urban terlayani, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjangkau populasi rentan dan termarginalkan.

Peran Strategis Sosialisasi dan Edukasi dalam Perubahan Perilaku Reproduksi

Komponen sosialisasi dan edukasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB. Hasil wawancara dengan petugas lapangan dan pasangan usia subur (PUS) menunjukkan bahwa mayoritas pengguna KB memperoleh informasi dari kegiatan penyuluhan langsung, media kampanye visual, serta interaksi dengan kader KB di tingkat kelurahan. Dalam beberapa kasus, penyampaian pesan yang disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa lokal terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program KB, terutama di kalangan kelompok konservatif yang sebelumnya menolak penggunaan kontrasepsi karena alasan religius atau kepercayaan adat.

Pendekatan komunikasi yang adaptif ini menjadi faktor pembeda dalam keberhasilan implementasi program KB di Makassar. Strategi ini sejalan dengan teori komunikasi perubahan perilaku yang menyatakan bahwa pesan yang disampaikan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal akan lebih diterima oleh khalayak sasaran. Dalam konteks ini, keberhasilan program KB tidak hanya bergantung pada tersedianya alat kontrasepsi, tetapi juga pada bagaimana informasi dikemas dan didistribusikan. Edukasi yang berkelanjutan dan bersifat dialogis terbukti dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap KB, memperkuat motivasi internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan kontrasepsi.

Tantangan Implementasi

Meskipun program KB di Kota Makassar menunjukkan tren keberhasilan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang menghambat pencapaian target optimal. Pertama, persoalan aksesibilitas masih menjadi isu utama, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan infrastruktur layanan kesehatan yang terbatas. Beberapa PUS menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan KB, baik karena lokasi yang jauh, jam operasional yang tidak fleksibel, maupun keterbatasan jumlah tenaga medis dan penyuluh KB. Kedua, misinformasi terkait efek samping kontrasepsi masih cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Mitos seperti "alat KB menyebabkan kemandulan" atau "KB bertentangan dengan ajaran agama" masih beredar luas, dan menjadi hambatan psikologis yang cukup kuat bagi sebagian kelompok masyarakat. Dalam kondisi ini, edukasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus melakukan klarifikasi dan dekonstruksi terhadap narasi yang keliru, dengan pendekatan berbasis empati dan kultural.

Ketiga, faktor sosial-budaya juga mempengaruhi keberhasilan program. Dalam beberapa komunitas, penggunaan kontrasepsi masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma kesuburan yang dianut secara turun-temurun. Pandangan bahwa memiliki banyak anak merupakan simbol keberkahan dan kekuatan keluarga masih dijumpai, meskipun tidak dominan. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi program KB membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya melibatkan sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, tokoh agama, dan pemangku kebijakan lokal.

Kontribusi Program KB terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KB di Kota Makassar tidak hanya berdampak pada penurunan angka kelahiran, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk, beban terhadap infrastruktur publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemukiman menjadi lebih terkendali. Selain itu, keluarga dengan jumlah anak yang terencana cenderung memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil, karena mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih rasional.

Secara konseptual, hubungan antara program KB dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan melalui pendekatan demografi transisional, di mana pengendalian kelahiran menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Dalam jangka panjang, keberhasilan KB berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, serta efisiensi fiskal di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, program KB seharusnya tidak hanya dilihat sebagai intervensi kesehatan, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar secara umum telah menunjukkan efektivitas dalam menekan laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Indikator seperti penurunan Total Fertility Rate (TFR) dan laju pertumbuhan penduduk memberikan bukti empiris keberhasilan intervensi yang dilakukan. Efektivitas ini ditopang oleh upaya sosialisasi dan edukasi yang responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan layanan kontrasepsi yang cukup menjangkau wilayah perkotaan. Namun demikian, tantangan masih ditemukan dalam bentuk kesenjangan akses di wilayah pinggiran, penyebaran informasi keliru terkait KB, dan resistensi budaya terhadap penggunaan kontrasepsi.

Sebagai kelanjutan dari temuan ini, studi lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas program KB berbasis teknologi digital serta pendekatan partisipatif komunitas dalam memperluas

jangkauan dan penerimaan program. Evaluasi longitudinal juga penting untuk menilai dampak jangka panjang KB terhadap kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, M. A. 2022. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang. Skripsi (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2024. Makassar dalam Angka 2024. Sulawesi Selatan: Badan Pusat Statistik.
- BKKBN. Tahun 2022. Modul 11. Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Budiani, N.W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” desa sumerta kelod kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal ekonomi dan Sosial, 2(1), 49-57.
- Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 2 No. 2 (Februari 2014) 8-10. Rompah, 2023. Efektivitas Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bitung Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Bitung, Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, 1247 – 1254.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sutopo. 2012. Teknologi dan Informasi dalam Pendidikan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Yukl, G.A., & W.S. Becker. 2006. Effective empowerment in organizations. Organization Management Journal, 3(3), 210-231.
- Yukl, G.A., & W.S. Becker. 2006. Effective empowerment in organizations. Organization Management Journal, 3(3), 210-231.